

Tolak Calo Anggaran atau Jadi Temuan

Nur Iskandar
Borneo Tribune, Pontianak

Oktober adalah bulan rawan karena para calo anggaran gentayangan menawarkan aneka proyek di dalam anggaran perubahan. Baik APBN-P maupun APBD-P. P = Perubahan.

"Jika tinggal dua bulan, jangan harap mekanisme ang-

garan akan berjalan dengan baik. Sebaiknya ditolak saja daripada nanti menjadi temuan," ungkap Auditor Utama Keuangan Negara BPK, Abdul Latief dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI di Hotel Aston, Senin (5/10) kemarin.

Menurut Abdul Latief jika mengikuti aturan yang benar

....Ke Halaman -11



PANEL. FGD yang diselenggarakan DPD bekerjasama dengan Kemitraan berlangsung di Aston (5/10) dengan panelis KPK Dedie A Rachman, Kemenkeu Agus Kristianto, Kemendagri Gatot Setyo Tamtomo, BPK Abdul Latief dan DPD RI Prof Dr Farouk Muhammad serta moderator Nur Iskandar dari Borneo Tribune. FOTO Istimewa

Tolak Calo Anggaran atau Jadi Temuan

terutama pengadaan barang dan jasa proses tender atau pelelangan saja sudah memakan waktu 1-2 bulan. "Mana mungkin proyek APBN-P ataupun APBD-P bisa dikejar. Jika dipaksakan paling banter bisa cair dananya satu kali setelah itu pupus dan menjadi temuan. Oleh karena itu sebaiknya ditolak daripada menjadi temuan," ungkapnya.

BPK menyimpulkan jika ada pejabat pembuat komitmen (PPK) berani dalam tenggat waktu sempit walaupun dengan alasan tekanan politik, maka korbanannya adalah kualitas kerja. Kualitas material bangunan akan dikorbankan dengan laporan asal jadi.

Diakui BPK bahwa selama ini yang menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah gentayangnya para calo seperti yang terjadi di Departemen yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar serta oknumnya dituduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun pihak yang menjadi tersangka uta-

manya adalah mereka yang benar-benar rakus harta, dan kedua adalah pegawai negeri sipil biasa yang menjadi korban. Lebih tepatnya dikorbankan. "Oleh karena itu lebih baik ditolak," ungkapnya.

Rayuan para calo menurutnya memang manis. Manis namun menjadi racun. "Jika Anda mendapat rayuan para calo itu sebaiknya cek dengan seksama benartidak ada pagu dana sebagaimana yang ditawarkan. Kerap kali terjadi penipuan," timpalnya. Beberapa kasus terjadi dengan para pejabat yang baru dilantik seperti kepala dinas, badan, kantor, bahkan kepala daerah.

Turut tampil di dalam FGD ini Prof Dr Farouk Muhammad (DPD), Dedie A Rachim (KPK), Agus Kristianto (Kemenkeu), dan Gatot Setyo Tamtomo (Kemendagri). Sementara peserta berjumlah 50 dari berbagai instansi kabupaten, kota dan Provinsi Kalbar. Turut hadir 12 anggota DPD RI tak terkecuali Erma S Ranik

senator asal Kalbar.

FGD yang berlangsung sejak pukul 13.00-17.30 ini menampung keluh-kesah penyelenggara negara soal tata kelola keuangan apakah ada intervensi politik, aturan yang serabutan, atau koordinasi yang macet. "Kita selaku anggota senat menampung sekaligus akan menelorkan rekomendasi soal transparansi anggaran sesuai tupoksi DPD RI. Demikian agar negara bisa bebas dari praktik korupsi," ungkap Prof Dr Farouk yang juga mantan Kapolda NTB serta Kapolda Maluku.

Pada kesempatan presentasi, KPK lebih menekankan pentingnya pencegahan praktik korupsi ketimbang menindak atau menangkap para pelakunya. "Kini kita menangani 70 kasus korupsi. Ribuan lainnya sedang dalam pengusutan. Hal ini menunjukkan betapa bermasalahnya keuangan di Republik ini," kata Dedie A Rachman. KPK berharap setiap daerah mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). □